HARTA WAJIB ZAKAT DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

Makalah

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqh Zakat & Wakaf

Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Musfirah HR.

Nurul Fani Fajrianti Rusliah

Dosen Pengampu :

Samsul Arifai, S.A.B., M.A.

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
A. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	2
B. Implementasi Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	4
Kebijakan Mutu BAZNAS	5
Tujuan Mutu BAZNAS	6
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang disampaikan kepada fakir miskin dengan mengharapkan keberkahan, mensucikan jiwa, mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan.

Kemudian Harta yang wajib dizakatkan secara umum al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap yang dimiliki, seperti dikemukakan dalam surat at-Taubah: 103 dan juga diambil dari setiap usaha yang baik dan halal, seperti yang digambarkan dalam surat al-Baqarah : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267).

Lembaga zakat adalah lembaga yang berada ditengah-tengah publik sehingga dituntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam menjalankan aktivitasnya sebagai amil mempunyai prinsip yang harus ditaati atau dipatuhi, diantaranya organisasi pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa OPZ harus transparan dalam menjalankan segala tugas-tugasnya (Al Anhar, 2012).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengetahui apa saja harta wajib zakat?
2. Mengetahui bagaimana implementasi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ)?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

1. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakati walaupun dalam bentuk uang atau potongan ketika telah mencapai nisab, mencapai satu tahun (haul), dan bersih dari hutang serta kebutuhan-kebutuhan pokok. Nisab emas dan kadar wajib zakatnya ketika mencapai dua puluh dinar (sekitar Rp 958 ribu). Jika emas telah mencapai dua puluh dinar dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Sementara itu, nisab perak ketika mencapai dua ratus dirham (setara Rp 784,9 ribu) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Selebihnya dihitung dengan presentasi seperti itu, baik sedikit maupun banyak.

2. Zakat Piutang

Harta piutang dibagi menjadi dua macam:

- Pendapat pertama, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang mau mengakui dan membayarnya. Hal itu berarti pemilik piutang wajib mengeluarkan zakatnya ketika telah menerima piutangnya. Demikian pendapat mazhab Ali, Tsauri, Abu Tsaur, Hanafiyah dan Hanabilah.
- Pendapat kedua, piutang yang menjadi tanggungan seseorang yang sulit membayarnya, mengingkarinya, atau menundanya. Pendapat Qatadah, Ishaq, Abu Tsaur, dan Hanfiah menyatakan bahwa piutang tersebut tidak wajib dizakati karena tidak dapat diambil pemiliknya untuk dimanfaatkan.

3. Zakat Uang Kertas, Cek dan Sejenisnya

Cek adalah dokumen utang yang dijamin. Cek wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab yaitu 27 Riyal Mesir karena seseorang dapat mencairkannya menjadi uang dengan cepat.

4. Zakat Perhiasan

Para ulama telah sepakat bahwa intan, mutiara, yaqut, permata dan batu berlian tidak wajib dizakati, kecuali jika dijadikan barang perniagaan.

5. Zakat Maskawin

Abu Hanifah berpendapat bahwa maskawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah diterima olehnya. Sebab maskawin merupakan ganti atau imbalan dari selain harta sehingga tidak ada kewajiban zakat di dalamnya sebelum

diterima, seperti utang kitabah (utang seorang budak yang harus ia bayar pada tuannya agar ia bisa merdeka). Setelah maskawin diterima, zakatnya wajib dikeluarkan dengan syarat telah mencapai nisab dan haul, kecuali jika perempuan yang berhak atas maskawin tersebut memiliki harta yang telah mencapai nisab selain maskawin. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa perempuan wajib menzakati maskawinnya ketika telah mencapai haul walaupun belum ada dukhul (hubungan intim).

6. Zakat Perniagaan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat telah berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati. Harta perniagaan yang jumlahnya mencapai nisab dan haul, hendaklah menilai harganya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakat 2,5 persen dari nilai tersebut.

7. Zakat Hasil Pertanian

Hasil panen dari pertanian dapat berupa buah-buahan, padi maupun sayur. Ketentuan dikeluarkannya zakat pertanian adalah hasil pertanian yang sudah mencapai kurang lebih 653 Kg.

8. Zakat Hewan Ternak

Hadits-hadits telah menjelaskan kewajiban zakat untuk hewan unta, sapi, dan kambing. Syarat zakat hewan ternak tersebut yaitu, mencapai nisab, haul, dan digembalakan di padang rumput yang mubah dalam sebagian besar tahun.

9. Zakat Tabungan dan Investasi

Apabila seorang muslim memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen. Sementara, zakat investasi adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari hasil investasi yang dimiliki. Seperti bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi ditunaikan saat sudah menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

10. Zakat Barang Temuan

Barang temuan ini adalah barang yang selama bertahun-tahun dan tidak diketahui pemiliknya. Maka harta tersebut wajib ditunaikan zakat sebesar 20 persen. Sebelum mengeluarkan zakat, harta tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan yaitu.

- a. Kepemilikan penuh
- b. Harta halal dan diperoleh secara halal
- c. Harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan (dimanfaatkan)
- d. Mencukupi nisab
- e. Bebas dari hutang
- f. Mencapai haul
- g. Dapat ditunaikan saat panen

B. Implementasi Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Organisasi merupakan sebuah kumpulan yang mempunyai tujuan yang sama, pemikiran yang selaras, dan serta perencanaan dan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Amul zakat yang secara tekstual terdapat dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60, memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, maupun dalam usaha melakukan pendayagunaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan dan terbebas dari kemiskinan.

Dalam khazanah hukum islam, yang bertugas mengambil dan menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Menurut Imam Qurthubi, Amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal yang sama dikemukakan Ibn Hazm mengatakan bahwa amil zakat adalah para pekerja zakat yang diutus oleh Imam yang wajib untuk menaatinya, yaitu mereka yang bisa dibenarkan (dipercaya) dan mereka yang menjadi pengumpul zakat.

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faki, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha bijaksana.”

Qardhawi (2010) mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki amil zakat, yakni sebagai berikut :

1. Beragama Islam, karena zakat terutama berkaitan dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin.

2. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga patut disertai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
3. Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

SDM amil zakat yang ada saat ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua kelompok : (1) Amil tetap/*full timer*; (2) Amil tidak tetap/*part timer* yaitu orang-orang yang mengelola zakat di lembaga amil zakat, tapi waktu yang digunakan adalah paruh waktu atau sambil mengerjakan tugas lain yang diprioritaskan.

Zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Kebijakan Mutu BAZNAS

1.	Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2.	Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik.
3.	Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
4.	Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan

LAZ.
Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, 5.pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga 6.keuangan syariah.
Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu 7.menumbuhkan budaya kerja Islami.
8.Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

Tujuan Mutu BAZNAS

Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, 1.perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan 2.kesejahteraan mustahik.
3.Menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tatakelolal BAZNAS dan LAZ.
Menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan 4.untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan 5.implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan 6.PSAK 109.
Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah 7.pengawasan OJK.
8.Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1.	Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2.	Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3.	Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4.	Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1.	Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2.	Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3.	Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya

kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Harta yang wajib keluar zakatnya adalah :

- Zakat emas dan perak
- Zakat piutang
- Zakat uang kertas, cek dan sejenisnya
- Zakat perhiasan
- Zakat mas kawin
- Zakat perniagaan
- Zakat hasil pertanian
- Zakat hewan ternak
- Zakat tabungan dan infestasi
- Zakat barang temuan

BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

B. Saran

Menurut pendapat kami diharapkan pembaca mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan implementasi zakat di LAZ khususnya di BAZNAS. Serta memaklumi segala bentuk kerancuan dalam makalah kami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Zakat Perspektif Mikro-Makro/kencana prenatalmedia group

<https://bengkulu.baznas.go.id/halaman/detail/tentangbaznas>